



Problematika DAK Pendidikan dan Dampaknya

Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI

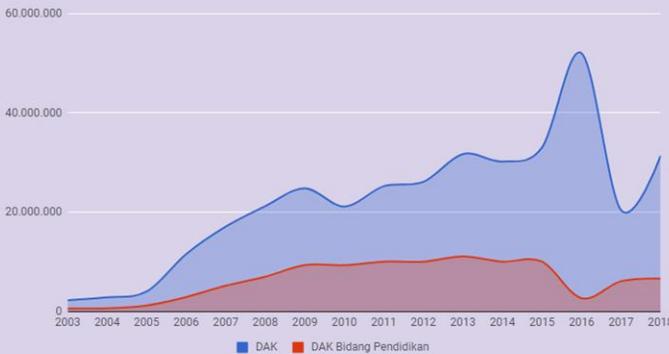
Profil Pendidikan Indonesia

Pada tahun 2002, Indonesia memulai serangkaian reformasi kebijakan untuk memperkuat akses dan kualitas pendidikan.

Reformasi juga dilakukan dengan memberikan tambahan sumber daya keuangan untuk sektor pendidikan.

Total dana transfer ke pemerintah daerah meningkat sebesar **25 persen** secara riil antara tahun 2011 dan 2017, sementara Anggaran Pendidikan Nasional hanya meningkat sebesar **16 persen** pada periode tersebut.

DAK dan DAK Bidang Pendidikan



DAK bidang pendidikan dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.



Alokasi DAK dalam bidang mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Permasalahan DAK Pendidikan



Masih ditemukan tumpang tindih kewenangan



Ketersediaan Lahan



Keterlambatan pencairan DAK



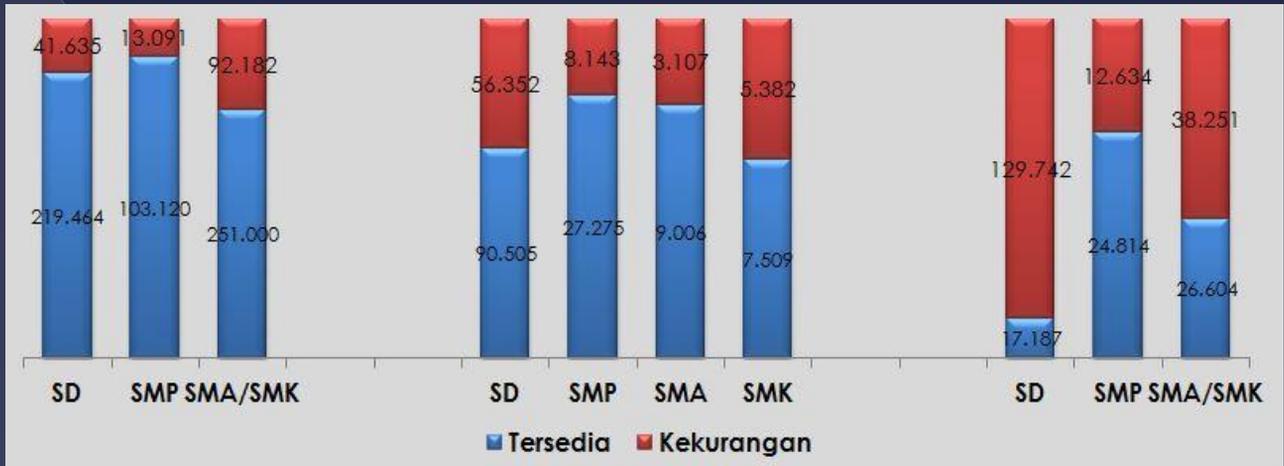
Permasalahan pada *E-planning*

Temuan dan Kondisi Penyerapan DAK Pendidikan

Kekurangan Ruang Kelas 2015

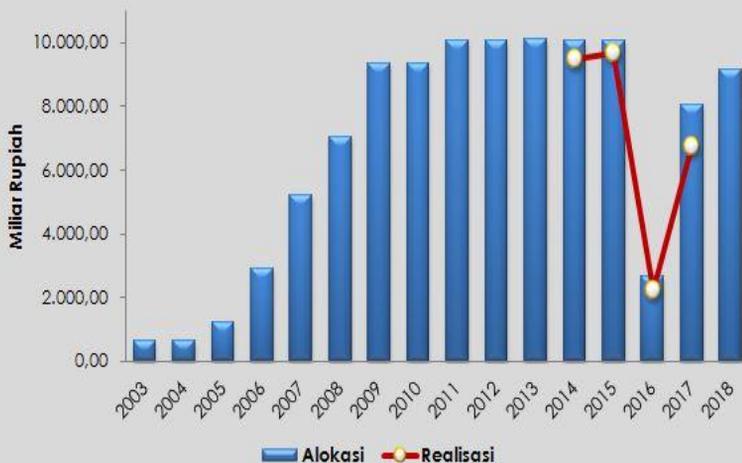
Kekurangan Perpustakaan 2015

Kekurangan Laboratorium 2015



Sumber : IHPS II 2016

Alokasi dan Realisasi DAK Pendidikan



Alokasi DAK Pendidikan mengalami tren kenaikan dari tahun 2003 - 2015. Namun pada TA 2016, alokasi DAK Pendidikan mengalami penurunan yang cukup drastis karena dihilangkannya DAK untuk SMP dan SMA/SMK.

Pada TA 2016 dan 2017, penyerapan DAK Fisik Pendidikan mengalami **penurunan** menjadi **84,07 persen** dan **83,45 persen** yang disebabkan adanya keterlambatan penerbitan juknis dari Kementerian Pendidikan dan sering terjadinya revisi atas juknis di tahun berjalan.

DAK Pendidikan dan Dampaknya Bagi Pendidikan Indonesia

Hasil studi BAPPENAS bersama BPS dan UNDP : DAK pendidikan merupakan salah satu DAK yang menunjukkan **pengaruh positif** terhadap **pertumbuhan ekonomi**, meskipun **tidak signifikan**. Sementara itu terhadap **IPM**, DAK pendidikan menunjukkan **pengaruh negatif**.

Masalah dalam implementasi DAK saat ini lebih banyak diakibatkan oleh kurang baiknya mekanisme penentuan bidang prioritas dan daerah penerima DAK, bukan karena kecilnya jumlah moneter dari alokasi DAK per bidang tersebut.

Pemerintah Pusat belum memiliki instrumen yang menilai capaian kualitas pendidikan dan pengawasan anggaran pendidikan, terutama penggunaannya di daerah.

Rekomendasi

Pemerintah perlu menghadirkan instrumen pengawasan kualitas pendidikan yang tepat agar pengawasan penggunaan anggaran dapat berjalan dengan baik.

Pemda perlu membuat laporan tentang DAK yang berisi informasi tentang output berupa rencana pemanfaatan dan kerangka waktu pemanfaatan. Laporan ini harus dapat juga digunakan oleh Bappenas, K/L teknis, dan juga Kemendagri.

Perihal juknis yang diterbitkan Pemerintah Pusat demi keseragaman pelaksanaan program yang didanai DAK, perlu juga dipertimbangkan skenario bagi kabupaten/kota yang memiliki masalah kekurangan lahan.